



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3511505, FAKSIMILE (021) 3511486, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : Und - 84 /PK/2017
Sifat : Segera
Hal : Undangan Workshop

00 November 2017

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
(terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Tahun Anggaran 2018, kami bermaksud untuk menyelenggarakan **Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2018**. Tujuan penyelenggaraan workshop tersebut adalah agar: (1) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dapat disusun dan ditetapkan secara tepat waktu, mengingat peraturan dimaksud merupakan salah satu syarat penyaluran Dana Desa; (2) penyampaian pokok-pokok yang perlu dimuat dalam peraturan bupati/walikota dimaksud agar selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan (3) pemberian asistensi penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa berdasarkan pagu Dana Desa pada APBN TA 2018.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta bantuan Saudara untuk menunjuk 3 (tiga) orang pejabat/pegawai dari unit yang menangani bidang keuangan, pemerintahan/pemberdayaan masyarakat desa, dan *legal drafting* peraturan daerah, agar dapat hadir pada workshop yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin-Selasa, 27-28 November 2017

(jadwal per Kabupaten/Kota terlampir)

Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Hotel Redtop, Jalan Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat

Penyelenggaraan workshop tersebut tidak dipungut biaya. Panitia menyediakan konsumsi selama kegiatan berlangsung, sedangkan akomodasi dan transportasi dibebankan kepada anggaran perjalanan dinas masing-masing daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Boediarso Teguh Widodo
NIP 19580823 198210 1 001

Jadwal Acara

Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2018

Hotel Redtop, Jalan Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat

Waktu	Acara	PIC
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 08.45	Laporan Panitia	Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
08.45 – 09.30	<i>Keynote Speech</i> dan Pembukaan	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
09.30 – 09.40	<i>Coffee Break</i>	
Pemaparan Materi Secara Panel		
09.40 – 11.40	Materi I : Kebijakan Dana Desa TA 2018	Kemenkeu
	Materi II : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pokok-Pokok Muatan Revisi Permendagri 113 Tahun 2014	Kemendagri
	Materi III : Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018	Kemendes dan PDT
11.40 – 12.45	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.45 – 13.30	ISHOMA	
Peserta Dibagi ke Dalam Kelompok/Kelas		
13.30 – 15.00	Pokok Muatan Peraturan Bupati/Walikota dan Bimbingan Penghitungan Dana Desa	• Instruktur • Peserta membawa perlengkapan laptop
15.00 – 15.15	<i>Coffee Break</i>	
15.15 – 16.30	Lanjutan (Bimbingan Penghitungan Dana Desa)	• Instruktur • Peserta membawa perlengkapan laptop
16.30 – 17.00	Penutupan	Panitia

Mohon perhatian:

1. Untuk mendukung pelaksanaan acara, mohon dapat melakukan konfirmasi kehadiran melalui email ke subditdok.djpk@gmail.com atau telepon ke 021-3511505, Sdr. Dastam (0812 9055 594)
2. Panitia tidak menanggung transportasi dan akomodasi selama acara berlangsung.
3. Peserta workshop agar membawa laptop dan media pemindah data (*flashdisk*).

Lampiran

Nomor : Und-~~31~~ /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 28 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat	
1	Kab. Limapuluh Kota
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Agam
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Kepulauan Mentawai
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Padang Pariaman
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Pasaman
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Pesisir Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Sijunjung
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Solok
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Tanah Datar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kota Sawahlunto
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kota Pariaman
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Pasaman Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Dharmasraya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kab. Solok Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Provinsi Sulawesi Utara	
1	Kab. Bolaang Mongondow
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Minahasa
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Kepulauan Sangihe
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Kepulauan Talaud
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Minahasa Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
6	Kab. Minahasa Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kota Kotamobagu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Minahasa Tenggara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
11	Kab. Bolaang Mongondow Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 28 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Timur	
1	Kab. Bangkalan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Banyuwangi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Blitar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Bojonegoro
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Bondowoso
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Gresik
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Jember
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Jombang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Kediri
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Lamongan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Lumajang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Madiun
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Magetan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kab. Malang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
15	Kab. Mojokerto
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
16	Kab. Nganjuk
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
17	Kab. Ngawi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
18	Kab. Pacitan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
19	Kab. Pamekasan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
20	Kab. Pasuruan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
21	Kab. Ponorogo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
22	Kab. Probolinggo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
23	Kab. Sampang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
24	Kab. Sidoarjo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
25	Kab. Situbondo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
26	Kab. Sumenep
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
27	Kab. Trenggalek
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
28	Kab. Tuban
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
29	Kab. Tulungagung
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
30	Kota Batu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-~~84~~ /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 28 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Papua	
1	Kab. Biak Numfor
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Jayapura
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Jayawijaya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Merauke
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Mimika
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Nabire
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Paniai
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Puncak Jaya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Kepulauan Yapen
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kota Jayapura
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Sarmi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Keerom
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Yahukimo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kab. Pegunungan Bintang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
15	Kab. Tolikara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
16	Kab. Boven Digoel
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
17	Kab. Mappi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
18	Kab. Asmat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
19	Kab. Waropen
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
20	Kab. Supiori
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
21	Kab. Mamberamo Raya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
22	Kab. Mamberamo Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
23	Kab. Yalimo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
24	Kab. Lanny Jaya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
25	Kab. Nduga
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
26	Kab. Dogiyai
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
27	Kab. Puncak
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
28	Kab. Intan Jaya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
29	Kab. Deiyai
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-~~84~~ /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 28 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan	
1	Kab. Bantaeng
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Barru
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Bone
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Bulukumba
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Enrekang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Gowa
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Jeneponto
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Luwu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Luwu Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Maros
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Pangkajene dan Kep.
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Luwu Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Pinrang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kab. Sinjai
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
15	Kab. Kepulauan Selayar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
16	Kab. Sidenreng Rappang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
17	Kab. Soppeng
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
18	Kab. Takalar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
19	Kab. Tana Toraja
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
20	Kab. Wajo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
21	Kab. Toraja Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum